



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38, Jakarta Timue 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

LAPORAN

Kegiatan : Rapat Pelayanan SPBE PPID BNPB
Undangan : Und.70/BNPB/PUSDATINKOM/04.02.01/07/2020
MAK : Pelayanan PPID & Diorama
Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020

Hasil Kegiatan:

1. Terselenggaranya rancangan pelayanan komunikasi publik melalui Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE)
2. Adanya masukan dari peserta rapat/ anggota PPID dalam merespon rancangan SPBE PPID BNPB
3. Adanya strategi dalam rencana ke depan integrasi pelayanan semua SPBE BNPB terkait pelayanan Komunikasi Publik

Jakarta, 17 Juli 2020

Yang Melaporkan

Rusnadi Suyatman Putra

I. Kegiatan Pembahasan Dalam PPID_SPBE

Penggunaan sistem berbasis elektronik menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terutama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi akan lebih efektif dengan penerapan sistem tersebut diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media oleh masyarakat, termasuk di antaranya penyediaan layanan publik dalam berbagai bentuk aplikasi atau sistem layanan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan keadaan di mana sebagian besar masyarakat sudah bisa mengakses apapun melalui internet.

Selain itu, masyarakat juga mengharapkan, pemerintahan yang responsif, yaitu dapat memberikan respons langsung tanpa harus melewati proses yang sulit, waktu yang lama, dan berbiaya mahal. Penyelenggaraan SPBE ini untuk meningkatkan kinerja, baik itu penyelenggaraan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik. SPBE atau dikenal dengan istilah Elektronik Government (E-Gov) tak bisa dihindari seiring kemajuan jaman dan teknologi. Tidak bisa ditinggalkan, harus diikuti. Dengan SPBE bisa memotong waktu, birokrasi dan efisiensi. Diperlukan manajemen SPBE yaitu proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Agar SPBE atau E-Gov benar benar dilaksanakan berbasis elektronik. Penerapan SPBE difokuskan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada pada instansi pemerintah, sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien.

SPBE dilaksanakan dengan prinsip: efektivitas; keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan.

Unsur-unsur SPBE meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. Setiap Instansi Pusat menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat. Setiap Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Oleh karena itu manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

II. Notulensi

1. Rusnadi (kepala Sub Bidang Hubungan Antar Media):

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mendorong perbaikan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke arah yang lebih baik. Dengan demikian PNS dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.SPBE memperbaiki tata kelola manajemen pemerintahan oleh aparatur negara menjadi lebih baik. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

2. Rita Rosita S (kepala Bidang Humas)

Penggunaan SPBE akan membuat setiap pelayanan publik menjadi lebih efisien dengan bantuan teknologi modern. Pengerjaan pelayanan publik yang dibutuhkan pun dapat diselesaikan lebih cepat oleh para aparatur negara yang melayani.

3. Maryanto (kepala Bidang Teknologi dan Jaringan)

Menggambarkan semangat yang tinggi dalam penerapan SPBE dalam rangka bertransformasi menggunakan SPBE dalam setiap pelayanan terhadap publik. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin modern, maka pelayanan publik pun harus senantiasa mengikuti pola tersebut.

4. Nurdin (kepala Seksti TU Pusdalops)

Penerapan SPBE dalam setiap instansi, bergantung terhadap faktor internal yang menerima perubahan pelayanan berbasis elektronik. Kemudian, juga bergantung dari sektor eksternal yang mendorong perubahan pelayan publik dengan menggunakan teknologi modern.

5. Sridewanto (Kepala Seksi Evaluasi Pusdiklat)

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pemerintah. Ada 3 (tiga) unsur penting dalam penerapan SPBE tersebut, yaitu: Penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (enabler) dalam pelaksanaannya, dan yang terakhir adalah kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

III. Lampiran Foto



IV. Lampiran Absen



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200

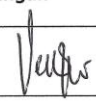
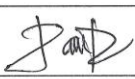


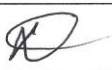

Situs : <http://www.bnpb.go.id>

BNPB

DAFTAR HADIR

Perihal : Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik
 Hari/Tanggal : Jum'at/17 Juli 2020
 Tempat : Ruang Kapusdatinkom Lt.12 Graha BNPB
 Jl. Pramuka Raya Kav. 38, Jakarta Timur

No	Nama	Golongan	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
1	Ruta Rosita.	IV/b	Kabid kamber	1
2	Teguh H.	III		2
3	Theophilus Y	III		3
4	Maryanto	III	Kabid Teksar	4
5	M. Nurdin Anis	III	Kasubbag TU	5
6	RUSNADI SUYATMAN	III	Pusatinkom	6
7	Tamara - W	II	Pusdatinkom	7
8	Rahmi Dwi K	III	Dit. Logpal	8
9	Lia Agustina	II	Pusdatinkomben	9
10	Atang Supena	III	Pusdatinkomben	10
11	Sriwulandari	III	HOKES	11
12	Fitriani #	II	Pusatinkom	12
13	Timuk yuni - A	II		13
14	SHI Marina	II		14

No.	Nama	Golongan	Jabatan / Instansi	Tanda Tangan
15	Veby			15 
16	Dume Sinaga	III	Komben	16 
17	Ignatius Toto S.	III	Komben	17 
18	Kenon			18 
19	Sri Dewanto			19 
20	ADE SUDARPAH			20 
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28
29				29
30				30
31				31
32				32
33				33
34				34

V. Lampiran Undangan



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7766, Faksimile: 021-2128 1200
Situs :<http://www.bnpb.go.id>

Nomor : Und. 70 /BNPB/PUSDATINKK/04.02.01 /07/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Rapat Evaluasi Pelayanan Komunikasi Publik**

Jakarta, 15 Juli 2020

Kepada Yth.
(Terlampir)


Berdasarkan agenda reformasi birokrasi dan evaluasi tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terhadap pelayanan komunikasi publik BNPB agar efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perlunya didukung dengan aplikasi dan sistem berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir dan memberikan masukan dan inovasi pelayanan komunikasi publik pada rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Juli 2020
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Kapusdatinkom, Lt 12, Graha BNPB
Jalan Pramuka Kav. 38 Jakarta Timur

Demikian kami sampaikan, untuk mohon kehadiran Bapak dan Ibu. Terima kasih.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan



Raditya Jati

1. Raditya Jati, M.Sc, Kapusdatinkom
2. Dra. Rita Rosita S, Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan
3. Maryanto, S.Kom, Kepala Bidang Teknologi dan Jaringan
4. Teguh Harjito, S.Si, Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
5. Atang Supena, S.Kom, M.M, Kepala Subbidang Pengelolaan Sistem dan Teknologi
6. Rusnadi Suyatman P, M.Ikom, Kepala Subbid Hubungan Antar Media
7. Theophilus Yanuarto, M.Si, Kepala Subbid Pemberitaan
8. Bunga Ekapeny, S.T, Kasubag Deputi Strategi & Sistem
9. Atiyah, S.AB, M.AP, Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
10. Rahmi Dwi Kartika, SKM, Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan
11. Muhammad Nurdin A, S.Kom, Kepala Subbag TU Pusdalops
12. Rija Ramdhani, SE, Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran II
13. Suprpto, S.Si, M.Si (Han), Kepala Seksi SDM bidang Penanganan Darurat
14. Sri Dewanto E, S.Si, MEMDV, Kepala Subbid Pemantauan, Pusdiklat
15. Indra Suryadi ilyas, SE, Kepala Subbagian Mutasi & Kesejahteraan
16. Selvina Toisuta, S.E, Staf Direktorat Mitigasi Bencana
17. Anggara S, S.Stat, Staf Direktorat Pemetaan & Evaluasi Risiko Bencana
18. Mandra Farandy J, S.Hub.Int, Staf Direktorat Perencanaan Rehab & Rekon
19. Yan Noldie Gideon P, AMd, Staf Inspektorat I
20. Tamora Naingolan, Staf TU Pusdatinkom
21. Ranti Kartikaningrum, Staf Komunikasi Kebencanaan
22. Sriwulandari, Arsiparis Pelaksana pada Biro Hukum
23. Liza Novita Purba, Staf Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
24. Dejedid, Staf Biro SDM & Umum